

KOMUNIKASI POLITIK LATIF AMIN SEBAGAI REPRESENTASI BANI KHOLIL MEMIMPIN BANGKALAN 2019-2020

Fatur Maulana Adistia¹, Awang Dharmawan²
Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial,
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Brawijaya
Faturadistia@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Peran agama Islam begitu sentral dalam dinamika kehidupan masyarakat Bangkalan. Berbagai keadaan sosial selalu dikaitkan dengan spirit keagamaan dengan kiai sebagai aktor utama. Kiai dengan dinamika politik lokal merupakan kajian yang menarik dalam ruang lingkup penelitian politik. Di Bangkalan, banyak kiai dari garis keturunan Syaikhona Kholil yang masuk ke arena politik, salah satunya Latif Amin yang memenangkan PILKADA Bangkalan tahun 2018 dan kini telah menjadi bupati Bangkalan periode 2018-2023. Kekuatan Patron bani Kholil dalam dinamika politik di Bangkalan ini, menarik minat peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan di tahun 2019-2020. Penelitian jenis deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan di tahun 2019-2020 adalah komunikasi tidak langsung yaitu dengan pendekatan komunikasi politik terwakilkan oleh Dinas-Dinas pemerintahan terkait. Publik dalam komunikasi politik Latif Amin adalah masyarakat, pejabat pemerintahan di kota dan desa, kiai dan ulama, serta kelompok *blater* di wilayah kabupaten Bangkalan. Adapun *goal* dan *objectif* komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Bangkalan 2019-2020 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Meskipun dengan komunikasi politik tidak langsung, masyarakat tetap yakin bahwa Latif Amin mampu menjadi pemuka agama sekaligus pemimpin yang baik dan mampu membawa perkembangan bagi Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Representasi, Bani Kholil, Bangkalan

Abstract

The role of Islam is so central in dynamics of Bangkalan society. Various social conditions are always associated with religious spirit with the kiai as the main actor. Kiai with the dynamics of local politics is an interesting study in political research scope. In Bangkalan, many kiai from Syaikhona Kholil lineage entered the political arena, one of them is Latif Amin who won the Bangkalan Election in 2018 and has now become Bangkalan regent for 2018-2023 period. The strength of Bani Kholil Patron in political dynamics in Bangkalan, attracted the interest of researchers conducting research with the aim of knowing Latif Amin's political communication as a representation of Bani Kholil in leading the Bangkalan district in 2019-2020. This research type is descriptive research with a qualitative approach shows the results that Latif Amin's political communication as the representation of Bani Kholil in leading Bangkalan district in 2019-2020 is indirect communication, namely the political communication approach represented by the relevant government agencies. The public in Latif Amin's political communication are the community, government officials in cities and villages, kiai and ulama, and blater groups in Bangkalan district area. The goal and objective of Latif Amin's political communication as the representation of Bani Kholil in leading Bangkalan 2019-2020 is the achievement of people's welfare. Even with indirect political communication, the community remains convinced that Latif Amin was able to become a religious leader, a good leader and able to bring development to Bangkalan district.

Key Word: Political Communication, Representation, Bani Kholil, Bangkalan

PENDAHULUAN

Tahun 1998 adalah awal dari perubahan proses sistem politik di Indonesia. Pada tahun tersebut Indonesia juga mengalami masa transisi menuju reformasi dalam bidang politik. Reformasi telah membawa sedikit angin segar bagi kerangka kehidupan baru masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Harapan-harapan akan Indonesia yang lebih baik dan lebih terbuka serta anggapan bahwa reformasi merupakan simbol era pencerahan, setidaknya telah memberikan sinyal optimisme dan dianggap mampu membawa banyak dampak perubahan. Baik itu perubahan

dalam bidang ekonomi, bidang kebebasan berpendapat dan bidang politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Contoh dari reformasi bidang politik adalah dengan adanya PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) yang juga telah dilaksanakan di kabupaten Bangkalan pada tahun 2018.

Peran agama (Islam) begitu sentral dalam dinamika kehidupan masyarakat Madura. Berbagai keadaan sosial selalu dikaitkan dengan spirit keagamaan dengan kyai sebagai aktor utama, dinamika sosial ini membuat Agama Islam memiliki akar struktur sosial dan kultural masyarakat, sehingga mengalami proses penyatuan identitas. Dalam proses inilah Agama Islam menjadi

bagian dari martabat dan harga diri orang Madura, proses kultural ini dipersepsikan sebagai bentuk dari rekigiusitas kemaduran (Rozaki, 2015:2) Salah satu dalam konteks ini adalah kiai, dimana kiai merupakan status yang dihormati dengan perangkat peran yang dimainkannya dalam masyarakat. Sebagai akibat dari status dan peran yang disandangnya, ketokohan dan kepemimpinan kyai telah menunjukkan kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadian dalam memimpin pesantren dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang kyai membangun peran strategis sebagai pemimpin masyarakat non-formal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Posisi vitalnya dilingkungan pedesaan sama sekali bukan hal baru. Bahkan, justru sejak masa kolonial bahkan jauh sebelum itu peran kyai tampak lebih menonjol dibandingkan dengan masa sekarang yang mulai memudar (Susanto, 2007:2).

Kyai dengan dinamika politik lokal merupakan kajian yang menarik dalam ruang lingkup penelitian politik di Indonesia. Seorang kyai sendiri tidak dimaknai sebagai orang yang hanya berkecimpung atau berkuat dalam bidang keagamaan saja, akan tetapi bagaimana kita menelaah kiai sebagai pembentuk ruang kuasa sosial-politik di dalam masyarakat. Dalam lingkungan sosio-kultural umat Islam di Indonesia, kyai memiliki kedudukan dan posisi penting dalam membina dan menata kehidupan masyarakat yang lebih religious. Melalui peran yang diperolehnya dalam bidang keagamaan dan sosio kultural, kyai kemudian tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hierarkis atas masyarakat.

Ditinjau dari segi ilmu politik kiai merupakan aktor politik yang mempunyai sumber daya politik berbasis kharismatik dan tradisional yang memungkinkannya membentuk sikap atau preferensi politis tertentu dalam struktur sosial masyarakat di sekitarnya (Mulkhan, 2010:55). Melalui kharisma yang melekat padanya, kiai dijadikan imam dalam bidang Ubudiyah dan sering diminta kehadirannya untuk menyelesaikan problem yang menimpa di masyarakat. Rutinitas ini semakin memperkuat peran kyai sebab kehadirannya diyakini membawa berkah. Selain itu, masuknya kyai ke arena politik praktis itu sendiri tidak hanya diartikan sebagai perjuangan politis eksistensi kebebasan bermadzab dalam agama Islam. Dalam sudut pandang Nahdlatul Ulama atau NU sendiri terdapat beberapa poin yang bias digunakan untuk menganalisis mengapa kyai tersebut dalam politik yaitu: (1) Kyai/ulama diharapkan sebagai aktor yang mampu membersihkan praktek politik yang kotor melalui

sikap integritas pemuka agama yang disandangnya; (2) Adanya semangat amar ma'ruf nahi munkar yang diemban para kyai/ulama untuk membebaskan arena politik dari kepentingan-kepentingan politik kotor; (3) Kyai/ulama berperan sebagai *filter* sosial dan *conflict breaker* dalam manajemen konflik dimana politik yang cenderung mengedepankan adanya komunalitas sendiri cenderung mengedepankan adanya komunalitas sendiri cenderung mudah rekooptasi oleh berbagai isu SARA (Suku, Ras, dan Agama); dan (4) Kyai/ulama diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan umat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam serangan politik.

Sebagian banyak kiai di Bangkalan yang masuk ke arena politik dan menjadi kepala daerah adalah kyai yang asih dalam garis keturunan/nasab dari Syaikhona Moh. Kholil. Seperti bani Kholil yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Bangkalan 2018 yakni RA. Latif Amin Imron yang kini telah didapuk menjadi bupati Bangkalan periode 2018-2023 juga semasa kampanye mendapat banyak dukungan, salah satunya dari tokoh Madura yang berada di Jakarta H. Rawi yang menyatakan dukungan dengan alasan RA. Latif Amin Imron memiliki trah kepemimpinan dari leluhurnya trah raja Madura barat dan Syaikhona Kholil, menurutnya R.A Latif Amin merupakan sosok yang memiliki kapasitas, visi, dan misi yang mumpuni untuk memimpin Bangkalan. Selain dukungan dari H. Rawi, RA. Latif Amin Imron juga mendapat dukungan moral dari para kiai-kiai Madura yang berada di tanah rantau seperti Jakarta, Surabaya dan daerah lain di pulau Jawa. Dukungan-dukungan ini sangat berpengaruh pada kekuatan patron klien politik bani kholil. Tidak hanya pada PILKADA Bangkalan, pada PEMILU Gubernur Jawa Timur 2018 dan PEMILU Presiden 2019 pun patron bani Kholil sangat mempengaruhi pilihan masyarakat. Dalam hal ini, kepercayaan tokoh agama maupun masyarakat terhadap bani Kholil tidak perlu diragukan lagi.

Dari dukungan tokoh-tokoh agama asli Madura dan masyarakat, jelas menunjukkan bahwa trah atau keturunan raja di Madura dan keturunan (bani) dari Syaikhona Kholil merupakan sosok yang dipandang baik secara agama maupun status sosial adalah sosok yang lebih tinggi dari masyarakat biasa dan dipercaya dapat memimpin masyarakat Bangkalan. Dari tahun 2003 sampai tahun 2018 saja, tercatat sudah 4 keturunan (bani) kholil yang terjun ke arena politik dan 3 diantaranya memenangkan

kontestasi politik dan memimpin kabupaten Bangkalan sebagai bupati.

Jatuhnya pilihan masyarakat serta tokoh agama pada RA. Latif Amin Imron dalam PILKADA Bangkalan 2018, tidak dapat dipungkiri adalah karena status Latif Amin yang merupakan keturunan (bani) Kholil. Syaichona Kholil, kakek dari Latif Amin sendiri merupakan tokoh agama yang besar di Bangkalan yang juga merupakan pemuka agama yang terkenal di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Bagi para pemeluk agama Islam yang fanatik pasti tidak meragukan cara memimpin dari Syaichona Kholil yang juga ikut serta mengembangkan Islam di Indonesia. Sehingga hal tersebut juga menjadi faktor warga Bangkalan dan sekitarnya untuk mendukung keturunan Syaichona Kholil yang biasanya disebut sebagai bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan. Meskipun mendapat dukungan dan kepercayaan dari tokoh agama dan masyarakat, pemimpin tetap harus memiliki strategi komunikasi politik dalam masa kepemimpinannya, tak terkecuali bagi pemimpin dari patron bani Kholil.

Kekuatan Patron bani Kholil dalam pemilihan kepala daerah di Bangkalan yang akhirnya memenangkan RA. Latif Amin Imron dalam PILKADA kabupaten Bangkalan di tahun 2018 ini, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait komunikasi politik yang dilakukan RA. Latif Amin Imron sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan di tahun 2019 - 2020, yang tentu didalamnya terdapat strategi komunikasi politik dan turut menjadi faktor kuat dalam kemenangannya di kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian jenis analisis deskriptif ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 4 informan yakni Haji Samsoel (Kepala Desa), Pak Tamim (masyarakat Bangkalan), Kiai Ranasih (Kiai Bangkalan sekaligus keluarga RA Latif Amin), dan Pak Muhlas (Pejabat Daerah). Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi Komunikasi Politik Latif Amin antara lain Kyai, Blater dan Pejabat daerah. Dalam penelitian ini, Teknik penentuan informan menggunakan Teknik *key person* dikarenakan peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian. Data-data yang sudah terkumpul,

akan direduksi dan di *display* untuk diverifikasi agar dapat ditarik kesimpulan dan diinterpretasikan. Data-data penelitian yang terkumpul dianalisis menggunakan teori patron oleh Legg Keith (1983), teori strategi marketin politik oleh Kotler dan Keller (2007), dan teori komunikasi politik oleh Nimmo (2000) karena pada dasarnya, penelitian ini berfokus pada komunikasi politik Latif Amin pasca kontestasi PILKADA Bangkalan tahun 2018 hingga kepemimpinannya pada tahun 2019-2020 yang mana Latif Amin sendiri merupakan seorang bani Kholil yang memiliki kekuatan patron di kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kekuatan Patron Bani Kholil di Bangkalan

Bani Kholil adalah sebutan untuk para keturunan (bani) dari Syaikhona Kholil, seorang Kiai besar di kabupaten Bangkalan. Syaikhona Kholil merupakan anak dari Abdul Latif, keturunan dari Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gunung Jati) yang lahir pada tanggal 14 Maret 1820 Masehi atau 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriyah. Kiai yang saat lahir diberi nama Muhammad Kholil ini, tinggal di desa Kramat, kecamatan Bangkalan, kabupaten Bangkalan. Ayahnya, Abdul Latif saat itu sudah menjadi ulama besar yang terkenal. Dari tah keturunan ini, sudah jelas bahwa dalam darah kiai Syaikhona Muhammad Kholil sudah mengalir darah Sunan Gunung Jati yang merupakan anggota dari Wali Songo yang dihormati dan disegani umat muslim di Indonesia.

Memasuki abad ke 19, Syaikhona Muhammad Kholil menjadi kiai termasyhur di tanah Jawa. Semua istri, anak dan cucu tak terkecuali menantu dari keturunannya, mendapat pestise sosial yang khusus dari masyarakat. Istri dan anak perempuan yang sudah menia mendap gelar “Kyai”, sedangkan anak laki-laki dan cucu serta menantu laki-laki mendapat julukan “gus”. Kiai mengharapkan agar para keturunan laki-lakinya yang mendapat julukan “gus” ini menjadi calon potensial yang akan memimpin pesantren mereka ke depannya dan meneruskan ilmu-ilmu mereka. Walaupun pesantren merupakan lembaga milik masyarakat yang menyangkut kepentingan publik, tetapi secara sejarah dan tradisi perkembangan pesantren masih dan tetap akan menjadi tugas dari para kiai. *Public image* terhadap para keturunan (bani) pemimpin pesantren ini adalah bahwa mereka (para “gus”) mampu mewarisi atribut spiritual

ayahnya, sehingga masyarakat tidak lagi sanksi dan tidak lagi memiliki keraguan akan kemampuan para keturunan (bani) dari kiai Kholil di Bangkalan.

Di kabupaten Bangkalan, terdapat suatu keyakinan bahwa seorang “gus” memiliki ilmu Laduni, yang artinya diberikan berkah oleh Tuhan dalam menguasai ilmu dan pengetahuan tentang Islam sejak mereka lahir. Masyarakat juga percaya bahwa mereka ditakdirkan menjadi ahli agama yang menguasai pengetahuan. Islam dan mampu memimpin pesantren atau bahkan ditakdirkan lahir ke dunia adalah untuk menjadi pemimpin pesantren. Kiai Kholil menjadi salah satu putra kiai yang dipercaya memiliki ilmu Laduni tinggi dengan kemampuannya menghafal kitab Alfiah dengan mudah, hal ini secara otomatis juga membuat kiai Kholil mampu menguasai tata bahasa Arab. Diusianya yang masih sangat muda, kiai Kholil bahkan telah menguasai ilmu Fiqih secara sempurna. Kelebihan-kelebihan spiritual ini, memperkuat kesan masyarakat. Kiai Syaikhona Muhammad Kholil akhirnya membangun pondok pesantren di desa Jenkebuan, kampung Senenan, desa Kemayoran kabupaten Bangkalan.

Kyai Syaikhona Muhammad Kholil akhirnya membangun pondok pesantren di desa Jenkebuan, kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kyai Syaikhona Kholil juga melakukan pengembangan pendidikan pesantren sebagai pendidikan alternatif selama masa penjajahan Belanda, karena ketika itu hanya orang dari golongan bangsawan saja yang diperbolehkan untuk belajar. Pesantren yang didirikan Syaikhona Kholil, bermunculan lulusan santri-santri yang juga mendirikan pesantren, sejak saat itu, budaya belajar di pesantren mulai menjamur di daerah Jawa hingga seluruh Indonesia. Sebagian besar pemimpin Selain pondok pesantren, kiai Syaikhona Kholil juga mencetak kader-kader bangsa yang beragama, beliau mendidik mereka hingga akhirnya menjadi pemimpin. Hingga saat ini, klien masyarakat Bangkalan berpegang teguh pada patron bani (keturunan) Kholil baik dalam hal agama, politik maupun sosial.

Dari deskripsi patron Bani Kholil di Bangkalan yang telah dipaparkan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa eksistensi Bani Kholil sebagai orang kuat lokal bersumber dari kultur masyarakat Bangkalan sebagai masyarakat santri yang menjunjung tinggi sosok kiai. Anggapan bahwa sosok kiai adalah sosok yang pandai, alim, wibawa dan kharismatik, sangat

mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bani Kholil. Kepercayaan ini diberikan masyarakat tidak hanya dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang lainnya yaitu bidang politik Posisi dan keberadaan bani Kholil di Bangkalan yang dihormati melebihi orang biasa, tumbuh dan mengakar menjadi sebuah adat serta budaya sejak wafatnya Syaikhona Kholil. Tak heran jika beberapa bani Kholil mampu memenangkan kontestasi politik demokratis. Walau oleh lawan kontestasi hal ini dianggap tidak mencerminkan asas demokrasi karena pilihan masyarakat cenderung lebih didasarkan pada latar belakangnya sebagai seorang bani Kholil, tetapi pada kenyataannya masyarakat yakin dan percaya bahwa bani Kholil dapat memimpin mereka dengan lebih baik.

Keadaan di Bangkalan ini, sesuai dengan Teori patronase Legg Keith (1983) yang menyatakan bahwa hubungan patron klien dibidang politik merupakan bentuk hubungan dua orang atau *dyadic*, yaitu antara yang lebih tinggi (patron) dan yang lebih rendah (klien). Dalam hal ini, masyarakat Bangkalan-lah yang bertindak sebagai klien dan Bani Kholil yang bertindak sebagai patron yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap klien.

B. Identitas Bani Kholil dalam Membangun Kharisma di PILKADA Bangkalan

Di Bangkalan, bani Kholil dipandang sebagai elit sosio kultural keagamaan karismatik yang memiliki banyak kemampuan dan disegani masyarakat. Masyarakat percaya bahwa keturunan Syaikhona Muhammad Kholil akan selalu memikirkan rakyat. Penghormatan masyarakat yang tinggi ini, membuat para bani Kholil dengan mudah mendapatkan posisi-posisi strategis di pemerintahan patron Bani Kholil dianggap hadir sebagai pemimpin yang merakyat serta mengayomi semua kalangan. Kultur masyarakat ini membuat Bangkalan mendapat sebutan sebagai masyarakat santri, yang selalu menjunjung tinggi dan patuh terhadap kyai termasuk para keturunannya.

Sifat patuh dan tunduknya masyarakat kepada patron Bani Kholil ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup keagamaan saja tetapi juga dalam ruang lingkup politik. Kepatuhan dan ketundukan masyarakat, akan berujung pada dukungan kepada para bani Kholil. Penghormatan masyarakat yang tinggi ini, membuat para bani Kholil dengan mudah mendapatkan posisi-posisi

strategis di pemerintahan seperti DPRD, DPR RI, Kepala Daerah atau Bupati maupun jabatan fungsional lainnya di pemerintahan dan partai politik. Di Bangkalan dapat dilihat banyaknya partai politik berbasis Islam yang menempati kyai didalamnya. Pengaruh yang sangat kuat ini, mengartikan bahwa bani Kholil adalah *local strongmen* di Bangkalan seperti apa yang dijelaskan oleh Migdal (2001) yang menyebutkan bahwa *local strongmen* tumbuh di masyarakat yang mirip dengan jejaringan dan berkat struktur jejaringan ini, para *local strongmen* memperoleh signifikan yang jauh melampaui pengaruh pemimpin dan pengaruh birokrat lokal formal. Mereka melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting dalam dirinya yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Jika dihubungkan dengan Bani Kholil, komponen penting dalam Bani Kholil yang dipercaya masyarakat disini adalah kemampuan atau kapasitas para Bani Kholil diberbagai aspek baik agama, sosial, budaya, dan politik yang melebihi masyarakat biasa. Keabsahan Bani Kholil sebagai *local strongmen* di Bangkalan dibuktikan dari hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang selalu memenangkan calon dari patron Bani Kholil. Patron Bani Kholil merupakan patron yang paling kuat di masyarakat Bangkalan dalam berbagai bidang salah satunya bidang politik. Masyarakat Bangkalan sangat menghomati dan segan terhadap kiai Syaikhona Kholil dan keturunannya. kultur masyarakat kabupaten Bangkalan sebagai masyarakat santri sangatlah kental dan dipengaruhi oleh kharisma pribadi dan segala sesuatu yang telah diwariskan Syaikhona Kholil pada Bangkalan, sehingga masyarakat percaya atas struktur sosial keturunan kiai Syaikhona Kholil dan memberi kesan serta *image* yang baik kepada seluruh bani Kholil. Kekuatan patron bani Kholil di kabupaten Bangkalan sangat besar, dan hal ini berlaku untuk berbagai bidang terutama bidang agama dan politik.

Keberadaan bani Kholil sebagai pemenang kontestasi politik, menjadi sesuatu yang menarik, apalagi jika kontestasi politik tersebut adalah pemilihan kepala daerah (PILKADA). RA Latif Amin Imron merupakan salah satu bani Kholil yang terjun ke dunia politik. Sebelum itu, kakak dari RA. Latif Amin yakni RKH. Fuad Amin Imron telah lebih dulu terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPR lalu kemudian mengikuti PILKADA Bangkalan dan menjadi

Bupati Bangkalan 2 periode (2003-2012). Setelah itu anak dari RKH. Fuad Amin Imron, Makmun Ibnu Fuad keponakan dari RA. Latif Amin, memenangkan PILKADA Bangkalan tahun 2013 dan menjadi Bupati menggantikan ayahnya.

RA. Latif Amin sendiri mengikuti kontestasi politik sebagai calon Bupati pada PILKADA Bangkalan periode 2018-2023 dan hasil PILKADA Bangkalan 2018 oleh KPU yang diumumkan pada tanggal 27 Juni 2018 tersebut, menetapkan pasangan calon RA. Abdul Latif dan Mohni memenangkan PILKADA Bangkalan 2018 dengan perolehan suara sebanyak 243.877 suara, mengalahkan pasangan calon lainnya yakni Farid Alfauzi dan Sudarmawan yang meraih dukungan sebanyak 184.434 suara, serta pasangan Imam Buchori dan Mondir A Rofii yang mendapat dukungan sebanyak 116.438 suara. PILKADA Bangkalan tahun 2018 bukan merupakan kontestasi politik pertama yang diikuti RA. Latif Amin, pada PEMILU 2014 sebelumnya juga RA. Latif Amin diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berhasil menduduki kursi Wakil Ketua II DPRD Bangkalan. Pada PILKADA 2018-2023, RA. Latif Amin kembali diusung PPP, ia dianggap pantas menjadi pemimpin Bangkalan karena memiliki kemampuan dan struktur sosial yang baik di masyarakat. RA. Latif Amin juga mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan tokoh masyarakat seperti Gus Ipul Wakil Gubernur Jawa Timur terdahulu.

Selain memiliki pengalaman dalam memimpin, faktor yang paling mendasari RA. Latif Amin masuk dalam dunia politik praktis adalah status sosialnya sebagai bani Kholil. Status sosial ini dipandang sebagai kunci kemenangan sehingga partai politik tanpa ragu mendapuk para bani Kholil, salah satunya Latif Amin, sebagai kandidat yang mewakili partai mereka. Baik masyarakat maupun kiai yang menjadi narasumber penelitian ini juga menyampaikan bahwa fakta jika Latif Amin adalah seorang bani Kholil, membuat mereka yakin untuk memberikan dukungannya pada Latif Amin di PILKADA Bangkalan 2018, terlebih Latif Amin juga dipandang sebagai sosok yang kharismatik.

Dari keseluruhan data yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa identitas sebagai bani Kholil yang dimiliki Latif Amin memang mempengaruhi dukungan masyarakat kabupaten Bangkalan, para ulama serta kiai besar di Indonesia, serta para santri di pondok pesantren

yang tersebar di kabupaten Bangkalan, akan tetapi yang dianggap lebih penting adalah pribadi dari Latif Amin itu sendiri. Pribadi atau kharisma merupakan sesuatu yang sangat penting dari sosok seorang pemimpin. Identitas bani Kholil mempermudah Latif Amin dalam membangun kharisma atau citra karena pada dasarnya status sebagai bani Kholil sendiri sudah memberikan citra dan penilaian yang baik di mata khalayak dan masyarakat.

C. Komunikasi Politik Latif Amin sebagai Representasi Bani Kholil dalam Memimpin Kabupaten Bangkalan 2019-2020

Sebagai representasi bani Kholil, Latif Amin yang telah terpilih menjadi Bupati Bangkalan periode 2019-2024 juga harus memiliki komunikasi politik selama memimpin kabupaten Bangkalan. Memimpin suatu daerah atau Kabupaten jelas memiliki keberbedaan dengan memimpin pondok pesantren, mengingat dalam suatu daerah atau Kabupaten terdapat masyarakat dimana karakteristiknya lebih kompleks. Komunikasi politik yang tepat sangat diperlukan seorang pemimpin daerah agar supaya visi dan misinya dapat tercapai.

Pendekatan analisis penelitian ini hanya menguji pada elemen komunikasi politik yang digunakan Latif Amin sebagai representasi Bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan tahun 2019–2020, walaupun secara teoritis menurut teori Nimmo (2000) terdapat tahapan lain namun tidak relevan untuk digunakan dalam analisis data penelitian ini, maka secara rinci elemen komunikasi politik yang digunakan untuk memaparkan data penelitian yaitu: Publik, Strategi evaluasi, serta *goal* dan *objektif*. Secara lebih lengkap, pembahasan mengenai elemen komunikasi politik RA. Latif Amin sebagai representasi Bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan tahun 2019–2020 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Publik dalam Komunikasi Politik Latif Amin

Dalam komunikasi politik, publik adalah objek yang dijadikan target atau sasaran yang bersifat umum namun tetap perlu ditentukan dengan spesifik. Penentuan publik ini dilakukan untuk mengetahui manakah target atau sasaran yang lebih diprioritaskan. Publik yang diprioritaskan dalam komunikasi Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Kabupaten Bangkalan 2019-2020 adalah masyarakat, hal ini sesuai dengan

penjelasan pada *goal* dan *objektif* komunikasi politik Latif Amin yang tertuju pada masyarakat dan telah dibahas sebelumnya.

Akan tetapi, dalam wawancara dengan ketiga narasumber, publik atau target sasaran komunikasi politik Latif Amin tidak hanya pada masyarakat, melainkan juga pada pejabat kota dan desa di kabupaten Bangkalan, pada kiai dan pada *blater*. Berikut penjelasan secara rinci terkait publik dalam komunikasi Latif Amin dalam memimpin Bangkalan 2019-2020.

A. Masyarakat sebagai Publik dalam Komunikasi Politik Latif Amin

Masyarakat Kabupaten Bangkalan menjadi target atau sasaran publik yang paling diprioritaskan dalam komunikasi Latif Amin selama memimpin kabupaten Bangkalan. Hal ini dibuktikan dengan *goal* dan *objektif* komunikasi politik Latif Amin yang ditujukan untuk masyarakat.

Dalam komunikasi politik seorang kepala daerah, masyarakat dalam daerah atau wilayah yang dipimpinnya jelas akan menjadi prioritas publiknya, karena visi dan misi kepala daerah sendiri adalah ditujukan untuk daerah yang dipimpin dengan masyarakat sebagai objek terpenting. Sama halnya dengan komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Kabupaten Bangkalan 2019-2020, masyarakat adalah publik yang diprioritaskan dalam komunikasi politiknya. Selain sebagai target atau sasaran publik dalam komunikasi politiknya, RA. Latif Amin juga dengan terbuka mempersilahkan masyarakat kabupaten Bangkalan untuk turut serta pada beberapa kegiatan sosial pemerintahannya.

B. Pejabat Kota dan Desa sebagai Publik dalam Komunikasi Politik Latif Amin

Selain masyarakat, pejabat kota dan pejabat desa di kabupaten Bangkalan juga merupakan publik dalam komunikasi politik Latif Amin. Latif Amin melakukan pendekatan dengan turun langsung kepada tiap kepala desa dengan cara menanyakan keluhan pada tiap desa dikepemimpinan sebelumnya agar dapat diperbaiki saat Latif Amin memimpin Kabupaten Bangkalan.

C. Kyai sebagai Publik dalam Komunikasi Politik Latif Amin

Kiai di Bangkalan yang notabennya adalah pendukung Latif Amin, juga menjadi salah satu publik dalam komunikasi politik Latif Amin. Hal ini tidak jauh dari faktor latar belakang status Latif Amin sendiri yang seorang bani Kholil dan tidak terlepas dari segala hal terkait kegiatan keagamaan.

Strategi mendekati kyai juga meliputi dengan cara mendatangi tiap-tiap pondokan yang ada di Bangkalan dengan menggunakan Bani Kholilnya sehingga mudah untuk masuk di tiap tiap pondokan Bangkalan. Hal ini juga sangat efektif karena yang diketahui oleh hampir semua golongan bahwa di Bangkalan sediri masyarakatnya patuh terhadap para kyai dan santri-santri di tiap pondokan pun pasti mengikuti semua permintaan atau yang disuruh oleh kiai kiai mereka. Selain itu, para kyai juga saat kampanye pun diberi panggung untuk ikut mendoakan Bangkalan dengan acara sholat malam dan dalam bentuk cara keislaman lainnya.

D. *Blater* sebagai Publik dalam Komunikasi Politik Latif Amin

Di Bangkalan, *blater* terkenal sebagai kelompok dengan kesan negatif dan berkaitan dengan tindakan kekerasan. Namun selama Latif Amin memimpin Bangkalan, kelompok *blater* menjadi bagian dari publik komunikasi politiknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa publik dalam komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Kabupaten Bangkalan 2019-2020 adalah masyarakat, pejabat pemerintah (kota dan desa), kaum kiai dan golongan *blater*. Masing-masing publik ini memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam suatu daerah atau Kabupaten. Sesuai dalam teori komunikasi politik oleh Nimmo (2000) yang menjelaskan bahwa publik komunikasi politik harus ditentukan dengan spesifik untuk menghindari terminology yang umum. Spesifikasi publik komunikasi politik Latif Amin adalah dengan mengklasifikasi sesuai peran dan karakteristik publik itu sendiri. Adapun dalam publik komunikasi politiknya, prioritas utama Latif Amin adalah masyarakat.

Adapun strategi pendekatan dengan *blater* adalah mendekati para *blater* ini untuk menjaga terjadinya konflik selama Latif Amin memimpin dan saat melakukan pemilihan waktu itu. Selain itu cenderung *blater* ini tidak memiliki pekerjaan sehingga Latif Amin masuk menggunakan kekuatan uangnya untuk memberikan pekerjaan kepada para *blater* tersebut.

2. Strategi Komunikasi Politik Latif Amin

Untuk kemenangannya dalam kontestasi PILKADA Bangkalan tahun 2018, Latif Amin melakukan strategi komunikasi politik dengan pendekatan publik. Saat kontestasi PILKADA, pendekatan publik Latif Amin sebagai strategi

komunikasi politiknya untuk kemenangan terfokus pada pendekatan koalisi dan masyarakat. Kekuatan patron yang dimiliki Latif Amin sebenarnya dapat secara otomatis membuat dukungan mengalir bagi Latif Amin. Namun untuk memperbesar peluang kemenangan, Latif Amin tetap melakukan konsolidasi dengan merangkul partai pendukung, membentuk tim kemenangan yang tersebar di seluruh kabupaten Bangkalan, melakukan kunjungan ke masyarakat, melakukan pendekatan dengan kaum *blater*, kunjungan ke kyai-kyai serta ulama besar lainnya di Bangkalan, juga menyusun visi misi yang disesuaikan dengan kondisi Bangkalan saat itu. Strategi komunikasi politik ini juga masih dilakukan hingga saat ini Latif Amin telah menjalankan perannya sebagai bupati Bangkalan selama 1 tahun.

Selama masa kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu menjalankan representasi kepemimpinannya dengan strategi komunikasi politik yang dimiliki, pula dengan Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2020. Strategi juga sangat dibutuhkan dalam komunikasi politik agar supaya *goal* dan *objektif* komunikasi politik tersebut dapat tercapai. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik yang digunakannya Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2020, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan Bangkalan, kiai pendukung dan masyarakat yang bertindak sebagai narasumber. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan strategi komunikasi politik yang dilakukan Latif Amin yaitu melalui pendekatan kultural yang meliputi:

1. Pendekatan dengan masyarakat

Dalam strategi komunikasi politik yang dilakukan dengan pendekatan masyarakat ini, Latif Amin memilih untuk melakukan komunikasi terwakilkan, yakni melalui Dinas-Dinas Pemerintahan yang nantinya petugas dari Dinas-Dinas tersebut akan melakukan sosialisasi atau kunjungan langsung ke masyarakat, seperti perkumpulan karang taruna, ibu-ibu PKK, dan pengajian-pengajian.

2. Pendekatan dengan Kyai

Pendekatan dengan kiai yaitu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang tak terlepas dari keseharian Latif Amin karena latar belakang statusnya yang sebagai bani Kholil.

3. Pendekatan dengan kaum *blater*

Pendekatan ini merupakan komunikasi politik yang dilakukan Latif Amin selama memimpin kabupaten Bangkalan adalah dengan berkomunikasi kepada orang, pejabat berwenang, atau kelompok tertentu yang bisa membantu membuat Bangkalan menjadi lebih baik, tidak selalu mengarah pada statusnya sebagai representasi Bani Kholil.

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Latif Amin dalam komunikasi politiknya sebagai representasi Bani Kholil dalam memimpin Bangkalan tahun 2019-2020 adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, kiai, dan kaum *blater*. Meskipun menyatakan kecewa terhadap perubahan komunikasi politik yang dilakukan Latif Amin dari pendekatan langsung menjadi pendekatan terwakilkan, namun narasumber ini menyatakan bahwa mereka (masyarakat) percaya terhadap semua yang dilakukan RA. Latif Amin, mereka juga menerima dan menghormati semua keputusan Latif Amin. Ini membuktikan bahwa sosok Latif Amin yang merupakan Bani Kholil sangat berpengaruh dan dipercaya masyarakat.

Keadaan tersebut selain mengidentifikasi Latif Amin sebagai *local strongmen*, juga mengidentifikasikan bahwa di Bangkalan terdapat fenomena patron klien seperti yang dijelaskan oleh Keith Legg bahwa patron klien merupakan hubungan antara yang lebih tua (patron) dengan yang lebih rendah (klien) dimana hubungan ini berkenaan dengan hubungan pribadi dan berdasarkan pada asas saling menguntungkan, jika dikaitkan dengan fenomena yang ada di Bangkalan. Hubungan yang terjadi didasari pada pertukaran ilmu yang dimiliki Latif Amin sebagai patron bani Kholil dengan kepercayaan dan rasa setia dari masyarakat. Latif Amin memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan dari aspek-aspek agama, sosial, politik dan budaya, dan kemudian masyarakat menganggapnya sebagai sosok yang berpengaruh kuat sehingga masyarakat membalas dengan memberikan kepercayaan, tunduk, kepatuhan, kesetiaan, penghormatan dan dukungan pada Latif Amin.

Selain strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi langsung dan pendekatan komunikasi terwakilkan kepada seluruh elemen masyarakat, beberapa strategi politik juga dilakukan Latif Amin sebagai strategi keberhasilan komunikasi politiknya sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan

tahun 2019-2020, yaitu strategi *positioning*, *differentiation* dan *branding*. Status Latif Amin sebagai Bani Kholil sangat memperkuat strategi politik Latif Amin sehingga mampu masuk didalam masyarakat manapun baik itu masyarakat biasa, pejabat pemerintah, para kiai dan ulama, hingga kelompok *blater* di Bangkalan dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan teori *positioning* dalam strategi marketing politik menurut Kotler dan Keller (2007) yang mengartikan bahwa *positioning* atau penempatan posisi sangat penting dalam mengawali komunikasi politik. Dalam *positioning* Latif Amin jelas sangat beruntung karena dia sendiri masih merupakan keturunan Syaikhona Kholil.

Penempatan atau penentuan posisi ini dimaksudkan agar Latif Amin terlihat lebih mampu dan sanggup dalam berkomunikasi politik Bangkalan daripada pesaingnya dalam PILKADA Bangkalan tahun 2018. Perlu diketahui bahwasanya pada PILKADA Bangkalan tahun 2018 tidak hanya Latif Amin saja calon yang diajukan dari patron bani Kholil, namun salah satu pasangan calon pesaingnya yakni Imam Buchori juga merupakan bani Kholil. Strategi *positioning* yang digunakan ketika PILKADA Bangkalan tahun 2018 berhasil menunjukkan bahwa Latif Amin adalah pemimpin yang lebih baik.

Dalam *positioning* Latif Amin jelas sangat beruntung karena dia sendiri masih merupakan keturunan Syaikhona Kholil. Patron bani Kholil ini telah berjaya pada PILKADA sebelumnya dengan catatan 3 periode berturut-turut telah dimenangkan. 2 periode terdahulu dimenangkan oleh RKH Fuad Amin yang tidak lain adalah kakak dari Latif Amin, dan 1 periode dimenangkan oleh Makmun Ibnu Fuad yang merupakan anak dari RKH Fuad Amin atau keponakan dari RA Latif Amin. Ketika itu, Latif Amin sendiri sudah memenangkan PEMILU dan menduduki kursi wakil ketua II DPRD Bangkalan. Status sebagai seorang bani Kholil terbukti sangat memperkuat strategi marketing politik.

Selain memperkuat strategi marketing politik dan membuat dukungan masyarakat jatuh pada bani Kholil, *positioning* Latif Amin juga mempermudah dirinya dalam berkomunikasi politik seperti yang telah disampaikan oleh kiai Ranasih sebelumnya bahwa Latif Amin mampu masuk didalam masyarakat manapun. Di Bangkalan, kelompok *blater* terkenal memiliki konotasi negatif. Kelompok ini dianggap memiliki kebiasaan yang mengarah

pada tindakan kriminal. Segala jenis pemasalahan, mereka memilih untuk menyelesaikan dengan tindakan kriminal.

Untuk sebagian pemimpin, kelompok anakis seperti ini terka dang diabaikan atau mereka memilih untuk menyerahkan segala kejadian dan kasus yang berkaitan dengan *blater* kepada pihak berwajib, namun berbeda dengan Latif Amin yang mampu berkomunikasi dengan mereka dan menjalin hubungan sosial dengan baik. Strategi *positioning* sampai sekarang juga digunakan dalam komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2020. *Positioning* Latif Amin sebagai seorang bani Kholil yang sekaligus seorang Kepala Daerah saat ini diharapkan dapat membantu penyampaian komunikasi politiknya sehingga *goal* dan *objectif* dapat tercapai.

Strategi marketing politik kedua yang dilakukan Latif Amin adalah *diferensiasi*. pendekatan yang dilakukan Latif Amin adalah pendekatan langsung kepada masyarakat ketika kampanye. Latif Amin terjun ke lapangan dan menemui masyarakat untuk berdiskusi tentang segala hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kabupaten Bangkalan saat itu.

Strategi marketing politik dengan cara *diferensiasi* seperti yang dijelaskan Kotler dan Keller (2007) bahwa *diferensiasi* adalah tindakan menyusun rangkaian perbedaan yang menunjukkan keunggulan. Selain *diferensiasi* dengan pesaing dalam PILKADA Bangkalan 2018, *diferensiasi* Latif Amin selama memimpin kabupaten Bangkalan ditunjukkan oleh statusnya sebagai bani Kholil. Dalam kebudayaan lokal Madura yang merupakan Masyarakat santri, sosok Latif Amin dipercaya untuk memimpin karena dianggap memiliki derajat sosial lebih tinggi daripada masyarakat biasa dan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dalam lingkungan Bangkalan. Hal ini juga dibenarkan oleh 3 narasumber dalam penelitian ini, yakni perwakilan pejabat pemerintah, masyarakat dan kiai. Ketiganya mengatakan bahwa status sosial bani Kholil yang dimiliki Latif Amin dan sosok pribadi Latif Amin sendiri yang memiliki visi misi lebih baik untuk membangun Bangkalan, membuat masyarakat yakin dan percaya pada kepemimpinannya.

Keberbedaan Latif Amin yang memiliki *public image* yang baik dan peduli terhadap Bangkalan ini, juga turut memperkuat *branding* Latif Amin. Hal ini membuat para ulama, kyai, dan tokoh masyarakat juga mendukung Latif Amin baik dalam PILKADA

Bangkalan 2018 lalu maupun sekarang disaat Latif Amin telah menjabat sebagai Bupati Bangkalan. *Branding* ini jika disesuaikan dengan teori Kotler dan Keller (2007) sangatlah penting dalam strategi politik terutama selama proses konsolidasi politik, karena dapat mempertahankan eksistensi atau kontinuitas seseorang dimata masyarakat dan pihak-pihak konsolidasi. Sehingga konsolidasi politik dapat terbentuk dan disepakati dengan cepat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi marketing politik Latif Amin sudah cukup baik.

3. Evaluasi Komunikasi Politik Latif Amin

Evaluasi merupakan elemen dari komunikasi politik yang dilihat dari sisi kelemahan dan kelebihan pada komunikasi politik itu sendiri. Untuk mengevaluasi komunikasi politik Latif Amin, peneliti melihat dari 3 sudut pandang berbeda, yakni sudut pandang pejabat pemerintahan, masyarakat dan kiai. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, secara keseluruhan komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin Bangkalan masih memiliki kekurangan selain kelebihan. Latif Amin dengan komunikasi politiknya telah mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok *blater* yang cenderung sulit dirangkul sehingga muncul sebuah kesan bahwa kiai dan *blater* di tanah Madura dapat berhubungan dengan baik walaupun tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya masing-masing. Dengan adanya komunikasi politik yang baik antara pemimpin kabupaten dengan kelompok *blater* ini, jumlah tindakan kriminal di Bangkalan juga menurun. Latif Amin mampu menjalankan representasinya dengan komunikasi politik dan strategi-strategi politik yang baik meliputi pendekatan komunikasi langsung, strategi *positioning*, *diferensial* dan *branding*. Dengan strategi komunikasi politik tersebut, kebudayaan masyarakat sebagai masyarakat santri tetap berkembang di tanah Bangkalan dan mampu berjalan beriringan dengan perkembangan kabupaten Bangkalan pada aspek-aspek lain selain agama. Semua proses sosial dalam komunikasi politik yang dilakukan Latif Amin juga dapat mempertahankan *publik image* yang baik dai masyarakat kepada patron bani Kholil. Namun selain kelebihan tersebut, komunikasi politik Latif Amin juga masih memiliki kekurangan yakni tidak konsisten.

Latif Amin selama memimpin Bangkalan melakukan komunikasi politiknya melalui Dinas-Dinas Pemerintahan, seperti rapat dengan Dinas

Koperasi untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Dari komunikasi politik tersebut, Latif Amin juga sekaligus dapat melakukan kontrol kinerja para pejabat pemerintah. Hasil dari rapat tersebut, akan diteruskan ke masyarakat jika diperlukan untuk disosialisasikan. Cara komunikasi politik ini sebenarnya sudah cukup efektif, mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki seorang pemimpin daerah adalah terbatas dan permasalahan dalam lingkup daerah adalah kompleks. Dengan strategi komunikasi politik yang telah dilakukan Latif Amin tersebut, arah dan tujuan dapat lebih jelas karena masing-masing Dinas pemerintahan memiliki fungsi yang berbeda sehingga dapat diklasifikasikan permasalahan yang ada dengan Dinas mana yang bertanggung jawab sesuai bidangnya.

Teori komunikasi politik oleh Nimmo (2000) menjelaskan bahwa perencanaan taktis dapat berjalan lebih mudah dan cepat ketika strategi komunikasi yang digunakan jelas arahnya dan disepakati bersama. Komunikasi politik tidak saja diperlukan suatu partai politik selama pemilihan umum, tetapi juga tetap diperlukan dalam merencanakan dan melaksanakan keberhasilan visi, misi dan tujuan bersama. Latif Amin melakukan perencanaan taktis tersebut dengan melibatkan Dinas pemerintahan terkait, agar Dinas terkait juga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan terarah. Perencanaan dan komunikasi politik yang terarah, dapat memberikan manfaat dalam membangun dan menciptakan kekuatan melalui konsistensi juga kontinuitas. Latif Amin juga menggunakan *website* kabupaten sebagai medianya melakukan komunikasi politik. Nimmo (2000) juga menjelaskan bahwa dalam komunikasi politik diperlukan sebuah taktik yang berupa media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan (komunikasi politiknya). Pemilihan *website* sebagai media komunikasi politik Latif Amin, sebenarnya sudah cukup baik karena dalam konteks organisasi pemerintahan yang bersifat publik, haruslah bersikap transparan kepada masyarakat. Segala bentuk kegiatan pemerintahan, jika dikomunikasikan dengan baik dan transparan pada masyarakat, akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan tersebut. Hanya saja, jika media yang digunakan adalah berupa *website*, komunikasi politik tersebut akan menjadi terbatas mengingat tidak semua elemen masyarakat dapat mengakses sebuah *website*.

Komunikasi politik Latif Amin sebagai

representasi bani Kholil selama memimpin Bangkalan tahun 2019-2020 memang sudah tidak lagi dilakukan dengan konsep pendekatan komunikasi langsung, tetapi baik elemen masyarakat, kiai maupun pejabat pemerintahan menilai bahwa kepemimpinan Latif Amin sudah cukup baik dan mampu membawa perkembangan bagi Bangkalan secara kualitas dan kuantitas. Terkait dengan beberapa aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi, masyarakat meyakini jika pemimpin mereka akan menindaklanjuti disisa waktu periode jabatannya. Keyakinan ini tentu dipengaruhi oleh status sosial Latif Amin sebagai representasi bani Kholil. Masyarakat tetap teguh, yakin dan percaya bahwa Latif Amin mampu menjadi pemuka agama, panutan bagi masyarakat dan sekaligus menjadi pemimpin politik yang baik.

4. Goal dan Objektif Komunikasi Politik Latif Amin

Dalam komunikasi politik, elemen *goal* dan *objektif* adalah penting karena terkait dengan hasil yang diharapkan dan tujuan khusus yang ingin dicapai. Sebagai seorang pemimpin suatu daerah atau Kabupaten, seorang Bupati pasti memiliki visi dan misi selama memimpin. Visi misi tersebut akan selalu condong pada kepentingan masyarakatnya dan disampaikan bahkan sejak Bupati masih berstatus sebagai calon atau kandidat dari kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Dari hasil wawancara baik dengan perwakilan pejabat pemerintah maupun dengan perwakilan kiai kabupaten Bangkalan, dapat dianalisis bahwa *goal* dari komunikasi politik yang dilakukan Latif Amin adalah mendidik dan menyadarkan masyarakat, yakni melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemerintahan atas perintah Latif Amin sebagai Bupati.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa *goal* dari komunikasi politik Latif Amin adalah ingin mendidik dan menyadarkan masyarakat, salah satunya tentang perekonomian. Untuk kemudian akan tercapai *objektif* dari komunikasi politik tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat atau perkembangan daerah Bangkalan yang menjadi lebih baik pada aspek ekonomi. Untuk masa kepemimpinannya selama 1 tahun ini, kemungkinan aspek ekonomi-lah yang menjadi konsentrasi Latif Amin dalam membangun Bangkalan, karena rapat yang sering dilakukan masih dalam lingkup Dinas Koperasi seperti yang telah disampaikan bapak Muklas selaku perwakilan narasumber dari pejabat

pemerintahan.

Selain untuk mengetahui *goal* dan juga *objectif* dari komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil selama memimpin Bangkalan, peneliti juga menganalisis keberhasilan dari *goal* dan *objectif* komunikasi politik tersebut melalui data wawancara. Telah dijelaskan dalam wawancara narasumber dari perwakilan pejabat pemerintahan bahwa selama masa kepemimpinan Latif Amin selama 1 tahun, aspek ekonomi menjadi konsentrasi dalam membangun Bangkalan.

Goal dan *objectif* dalam komunikasi politik Latif Amin selama memimpin Bangkalan 2019-2020 adalah termasuk dalam *information based*, yakni melakukan komunikasi politik yang bertujuan untuk mendidik atau menyadarkan, dalam hal ini adalah masyarakat. Selama 1 tahun kepemimpinan, disebutkan bahwa komunikasi Latif Amin masih berkonsentrasi dan fokus pada perekonomian, dan direncanakan pada sisa masa jabatannya akan dilanjutkan pada bidang lain. Menurut teori strategi komunikasi politik oleh Nimmo (2000), dijelaskan bahwa dalam komunikasi politik perlu adanya suatu perencanaan yang dibuat dan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Begitu pula dengan waktu komunikasi politik yang baik adalah yang dapat berjalan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah direncanakan.

Representasi komunikasi politik Latif Amin yang terkonsentrasi pada perekonomian selama memimpin kabupaten Bangkalan 2019-2020 dirasa masih kurang tepat. *Goal* dan *objectif* memang sudah jelas, yakni mendidik dan menyadarkan masyarakat agar tercapai kesejahteraan, tetapi jika hanya terkonsentrasi pada 1 bidang saja hanya karena sisa masa jabatan dianggap masih cukup waktu, menurut peneliti komunikasi politik ini menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam suatu daerah atau Kabupaten tidak hanya sebatas permasalahan perekonomian saja. Dalam teori strategi komunikasi politik oleh Nimmo (2000) yang telah dijelaskan di atas, seharusnya komunikasi politik disesuaikan dengan anggaran dan waktu. Adapun dalam melakukan komunikasi politik seharusnya dibuat beberapa strategi awal seperti menganalisis permasalahan yang ada di kabupaten Bangkalan dalam berbagai bidang. Analisis ini dilakukan untuk dapat mengidentifikasi dengan jelas segala bentuk permasalahan yang ada dan mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki.

Kemudian dari permasalahan-permasalahan

yang telah dianalisis dan diidentifikasi tersebut selanjutnya didiskusikan bersama dengan Dinas-Dinas Pemerintahan terkait untuk menyusun strategi penyelesaian permasalahan. Target dan tujuan dalam hal ini harus masuk dalam diskusi, adapun target itu sendiri juga mengarah kepada anggaran dan waktu dalam pencapaian tujuan karena komunikasi politik biasanya dilakukan pada waktu yang tidak menentu. Adapun dalam penentuan strategi penyelesaian masalah juga harus dilakukan dengan Dinas Pemerintahan yang berbeda, yaitu tergantung pada bidang permasalahannya, sehingga anggaran dan waktu menjadi poin penting dalam komunikasi politik. Dari strategi penyelesaian permasalahan yang telah disusun dan didiskusikan bersama, selanjutnya barulah menyusun komunikasi politik yang tepat yang bersifat persuasif atau yang dapat mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan penyelesaian masalah. Dengan demikian, *goal* dan *objektif* komunikasi politik Latif Amin yakni menyadarkan dan menyejahterakan masyarakat kabupaten Bangkalan dapat tercapai secara penuh sesuai dengan anggaran dan waktu.

PENUTUP

Simpulan

Dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan 2019-2020 adalah dengan komunikasi tidak langsung. Pendekatan komunikasi politik ini berbeda dengan yang dilakukan Latif Amin ketika sebelum memimpin Bangkalan, dimana Latif Amin melakukan pendekatan komunikasi politik secara langsung pada seluruh elemen masyarakat, pejabat pemerintahan, kiai dan ulama serta kelompok *blater* dengan strategi komunikasi meliputi *positioning*, *diferensial*, dan *branding* atas status sosialnya sebagai bani Kholil. Perubahan pendekatan komunikasi ini membuat masyarakat kecewa, namun kepercayaan masyarakat terhadap Latif Amin sangat tinggi sehingga masyarakat menghormati keputusan Latif Amin.

Publik dalam komunikasi politik Latif Amin sendiri adalah masyarakat, pejabat pemerintah di kota dan di desa, kiai dan ulama, serta kelompok *blater* yang berada di seluruh wilayah kabupaten Bangkalan, sedangkan *goal* dan *objectif* dari komunikasi politik Latif Amin sebagai representasi bani Kholil dalam memimpin kabupaten Bangkalan

tahun 2019-2020 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, baik masyarakat, pejabat pemerintah maupun kiai, menyatakan bahwa Latif Amin telah mampu membawa perkembangan bagi Bangkalan secara kualitas dan kuantitas. Dengan komunikasi politik yang demikian, masyarakat tetap yakin bahwa Latif Amin mampu menjadi pemuka agama, panutan sekaligus pemimpin yang baik untuk kabupaten Bangkalan.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, penulis menyarankan sebaiknya peneliti mengambil narasumber lebih banyak dari kelompok masyarakat.

Daftar Pustaka

Keith, Legg R. 1983. *Tuan, Hamba dan Politisi*. Terjemahan 7th edition. Jakarta : Sinar Harapan.
Kotler, Philip., and Keller, Kevin Lane. 2007.

Manajemen Pemasaran. 1st edition. Jakarta : Salemba Empat

Migdal, Joel S. 2001. *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge, UK : The Press Syndicate of the University of Cambridge.

Mulkhan, Abdul Munir. 2010. *Pesan dan Kisah Kyai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.

Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*. Terjemahan Tjun Surja. Cetakan III Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rozaki, Abdur. 2015. *Islam, Demokrasi dan Orang Kuat Lokal : Studi Kemunculan Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial di Bangkalan Madura*. Disertasi

Program Studi Islam, Universitas Islam Sunan Kalijaga

